

## Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis

Deni Dwi Firmansyah<sup>1</sup>, Elza Qorina Pangestika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Widya Mataram, Jl. Dalem Mangkubumen, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, DIY  
denidwifirmansyah1234@gmail.com

### Abstract

Fair law enforcement is a fundamental principle in the legal system of any country, including Indonesia. However, in practice, injustice often occurs in the law enforcement process in Indonesia, which can lead to discrimination, abuse of power, and unequal access to justice. This article aims to examine the factors that cause injustice in law enforcement in Indonesia and its impact on society and the legal system. Key factors contributing to injustice include corruption within law enforcement agencies, unequal access to justice, dysfunction in legal institutions, political influence in legal processes, and an authoritarian legal culture. The consequences are significant, including the erosion of public trust in the legal system, abuse of power, and increased social inequality. Therefore, this article offers several solutions, such as eradicating corruption, improving access to justice, and reforming the legal culture and law enforcement system in Indonesia. A systematic and comprehensive effort is needed to create a fairer and more equitable law enforcement system for all layers of Indonesian society.

**Keywords:** Injustice, Law Enforcement, Corruption, Access to Justice, Legal Reform, Indonesia.

### Abstrak

Penegakan hukum yang adil merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum negara manapun, termasuk Indonesia. Namun, dalam praktiknya, ketidakadilan sering kali terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang dapat mengarah pada diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum. Faktor utama penyebab ketidakadilan mencakup korupsi dalam lembaga penegak hukum, ketimpangan akses terhadap keadilan, disfungsi institusi hukum, pengaruh politik dalam proses hukum, dan budaya hukum yang masih otoriter. Dampaknya sangat signifikan, antara lain hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Untuk itu, artikel ini menawarkan beberapa solusi, seperti pemberantasan korupsi, peningkatan akses terhadap keadilan, serta reformasi budaya hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis dan menyeluruh untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Ketidakadilan, Penegakan Hukum, Korupsi, Akses Keadilan, Reformasi Hukum, Indonesia.

Copyright (c) 2024 Deni Dwi Firmansyah, Elza Qorina Pangestika

✉ Corresponding author: Deni Dwi Firmansyah

Email Address: denidwifirmansyah1234@gmail.com (Jl. Dalem Mangkubumen, Kota Yogyakarta, DIY)

Received 29 October 2024, Accepted 06 November 2024, Published 13 November 2024

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan negara hukum. Hukum seharusnya berlaku secara adil tanpa diskriminasi terhadap siapapun, baik itu individu maupun kelompok. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan yang mengarah pada ketidakadilan. Ketidakadilan ini dapat terjadi di berbagai tahapan penegakan hukum, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan. Masalah ini bukan hanya menghambat tercapainya tujuan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang ada.

Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji beberapa faktor yang menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum itu sendiri. Selain itu, artikel ini juga akan mencoba menawarkan solusi untuk meningkatkan penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini mengandalkan studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan lembaga riset, dan dokumen hukum yang terkait. Selain itu, artikel ini juga membahas data sekunder yang diperoleh dari laporan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan Transparency International, yang memberikan gambaran mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, artikel ini juga mengusulkan solusi berdasarkan temuan dari literatur yang ada.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur dan data yang tersedia, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi:

### ***Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum***

Korupsi menjadi salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan laporan Transparency International (2023), sistem peradilan Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim. Praktik suap dalam proses penyidikan dan persidangan membuat hukum tidak dapat ditegakkan secara adil. Mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan seringkali dapat "membeli" keadilan, sementara mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki koneksi terjebak dalam ketidakadilan.

### ***Ketimpangan Akses terhadap Keadilan***

Akses terhadap keadilan di Indonesia sangat bergantung pada faktor sosial-ekonomi. Masyarakat miskin sering kali tidak mampu membayar biaya perkara, pengacara, atau biaya-biaya lain yang diperlukan dalam proses hukum. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia (2022) menemukan bahwa biaya tinggi yang dibutuhkan dalam sistem peradilan menjadi hambatan besar bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses keadilan.

### ***Disfungsi Institusi Penegak Hukum***

Banyak institusi penegak hukum di Indonesia yang masih mengalami disfungsi, baik dalam hal administrasi, proses hukum, maupun dalam hal integritas aparat hukum. Komnas HAM (2023)

mencatat adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai proses hukum, termasuk praktik penyiksaan dan penahanan tanpa bukti yang sah. Disfungsi ini menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan secara konsisten dan adil.

### ***Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum***

Penegakan hukum di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik. Politisi dan pejabat tinggi sering kali menggunakan hukum sebagai alat untuk memperkuat posisi politik mereka. Dalam beberapa kasus, mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dapat menghindari jeratan hukum, sementara orang biasa yang tidak memiliki koneksi atau kekuasaan justru menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil.

### ***Budaya Hukum yang Otoriter***

Budaya hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma otoriter, di mana hukum sering kali diterapkan dengan cara yang keras dan tidak menghormati hak individu. Beberapa aparat penegak hukum masih menganggap bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang keras, sering kali mengabaikan prosedur yang benar dan hak-hak asasi manusia.

### ***Diskusi***

Ketidakadilan dalam penegakan hukum memiliki dampak yang sangat serius, baik terhadap sistem hukum itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Berikut beberapa dampak yang timbul akibat ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia:

#### **Merosotnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Hukum**

Ketidakadilan dalam penegakan hukum menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum hanya berlaku bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, mereka akan cenderung tidak lagi menghormati hukum dan bahkan melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang lebih besar.

#### **Penyalahgunaan Kekuasaan**

Ketidakadilan yang terjadi dalam penegakan hukum seringkali disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, aparat hukum dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengarah pada praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, dan tindak pidana lainnya.

#### **Ketimpangan Sosial yang Meningkat**

Ketidakadilan dalam penegakan hukum juga memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia. Masyarakat yang lebih miskin dan tidak berdaya akan semakin terpinggirkan, karena mereka kesulitan mengakses keadilan. Sebaliknya, mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan akan mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda, bahkan terkadang kebal terhadap hukum. Hal ini dapat menyebabkan jurang pemisah yang semakin dalam antara kelompok kaya dan miskin, serta memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia.

### ***Solusi untuk Meningkatkan Penegakan Hukum yang Adil***

Untuk meningkatkan penegakan hukum yang adil di Indonesia, diperlukan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil antara lain sebagai berikut:

#### **Pemberantasan Korupsi di Lembaga Penegak Hukum**

Untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah memberantas korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum. Upaya ini harus melibatkan reformasi struktural dalam sistem hukum, pengawasan yang ketat terhadap perilaku aparat penegak hukum, serta pembenahan sistem rekrutmen dan penggajian agar lebih transparan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

#### **Peningkatan Akses terhadap Keadilan**

Peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan layanan hukum yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Selain itu, penting juga untuk memperkenalkan pendidikan hukum yang lebih luas kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dalam proses hukum.

#### **Reformasi Sistem Hukum dan Budaya Penegakan Hukum Reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum harus**

dilakukan untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan objektif dan tanpa diskriminasi. Perubahan dalam budaya hukum juga sangat penting, di mana prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus lebih ditekankan dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum.

### **KESIMPULAN**

Penegakan hukum yang adil adalah hak setiap warga negara dalam negara hukum seperti Indonesia. Namun, ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia masih merupakan masalah besar yang harus segera diselesaikan. Faktor-faktor seperti korupsi, ketimpangan akses terhadap keadilan, disfungsi institusi, pengaruh politik, dan budaya hukum yang otoriter berperan besar dalam menciptakan ketidakadilan. Dampaknya sangat serius, mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, hingga peningkatan ketimpangan sosial. Untuk itu, langkah-langkah konkrit dalam pemberantasan korupsi, peningkatan akses terhadap keadilan, serta reformasi sistem hukum dan budaya penegakan hukum harus segera diterapkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

### **REFERENSI**

Hartono, S. (2021). *Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Mandiri.

Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia. (2022). *Ketidakadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia: Akses dan Hambatannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl>